

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA MUI NOMOR 24
TAHUN 2017 TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN
BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP
ENDORSEMENT PRODUK *SKINCARE* DI DERMA
SKINCARE BEAUTY**

SKRIPSI

Oleh

Umi Fathonah

NIM C92216133



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Umi Fathonah

NIM : C92216133

Fakultas/jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial Terhadap Endorsement Produk Skincare di Derma Skincare Beauty

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Desember 2020

Saya yang menyatakan



Umi Fathonah

C92216133

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial Terhadap Kerjasama *Endorsement* Produk Skincare di Derma Skincare Beauty” yang ditulis oleh Umi Fathonah NIM. C92216133 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 23 Desember 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sri Wigati', written over a horizontal line.

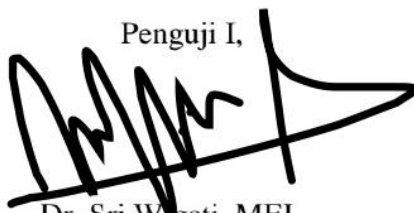
Dr. Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Umi Fathonah NIM. C92216133 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada hari Kamis, 14 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Sri Wigati, MEL.
NIP. 197302212009122001

Penguji II,



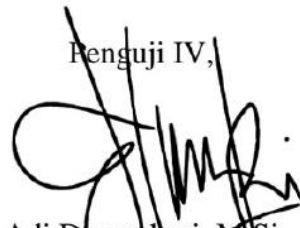
Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.
NIP. 195511181981031003

Penguji III,



Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji IV,



Adi Dumanhuri, M.Si.
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 14 Januari 2021

Mengesahkan.

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Umi Fathonah
NIM : C92216133
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : umifathonahkubro@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Dan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial Terhadap *Endorsement* Produk *Skincare* Di Derma Skincare Beauty

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juli 2021
Penulis

(Umi Fathonah)

- d. Jumhur ulama fiqh, *Ijārah* adalah menjual manfaat, yaitu sesuatu yang hanya diambil manfaatnya, bukan diambil bendanya. Jadi dilarang menyewa pohon untuk diambil buahnya, menyewa kambing untuk diambil bulu, susu atau anaknya, menyewa unta untuk menghamili betina, dan juga dilarang menyewa uang dirham dan dinar.
- e. Dalam fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 112/DSN-MUI/IX/2017 disebutkan, *Ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna manfaat barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa/upah, tanpa pemindahan kepemilikan barang tersebut.
- f. KHES Buku II Bab 1 pasal 20 ayat (9), *Ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan.

Dari pengertian diatas, diketahui bahwa transaksi *Ijārah* didasarkan pada adanya pengalihan manfaat dari barang maupun jasa dalam jangka waktu tertentu dan disertai dengan ganti atau upah. Dengan kata lain, dalam transaksi *Ijārah* tidak ada perpindahan kepemilikan karena hanya berupa pengalihan manfaat dari benda maupun jasa yang disewakan, seperti manfaat kendaraan, manfaat rumah, jasa seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu, dan lain sebagainya.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

- a. Dalam Al-Qur'an
 - 1) Al-Baqarah [2]:233

- c. Pihak penyewa (*musta'jir*) boleh menyewakan kembali kepada pihak ketiga dengan harga yang sama atau lebih rendah dengan ketentuan penggunaan barang sewa harus sesuai dengan penggunaan yang sewa pertama atau yang sudah diperjanjikan dengan pemilik barang (*mu'ajjir*) dan tidak menimbulkan kerusakan. Apabila penggunaannya tidak sesuai maka tidak diperbolehkan mengulangsewakan dan pihak *mu'ajjir* boleh meminta pembatalan. Mengulangsewakan pada dasarnya boleh dilakukan kecuali telah terdapat kesepakatan atau pihak *mu'ajjir* melarang mengulangsewakan barang sewa.
- d. Apabila terjadi perselisihan, menurut Ahmad dan Syafi'iyah
- 1) Terkait dengan harga sewa, maka pihak yang dimintai sumpahnya adalah pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) karena dianalogikan dengan transaksi jual beli, yaitu penjual sebagai pihak yang menentukan harga.
 - 2) Terkait dengan masa sewa, maka pihak yang dimintai klaim adalah pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*)
 - 3) Terkait dengan pelanggaran pemanfaatan obyek sewa, maka pihak yang dimintai klaim adalah pihak penyewa (*musta'jir*)
- e. Jika obyek *Ijarah* yang sudah berada dibawah pengawasan pemilik mengalami kerusakan, maka hak atas upah pada pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja harus dipenuhi. Namun, apabila rusaknya barang ketika masih dalam pengawasan pekerja, maka ia tidak berhak mendapat upah karena barang yang dikerjakan olehnya rusak sebelum dapat diserahkan.

- 2) Rusaknya barang yang disewakan yakni objek mengalami kerusakan / musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan kesepakatan. Misalnya sebuah mobil yang menjadi objek sewa menyewa, mengalami rusak parah akibat tertimpa pohon besar yang tumbang.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*) yaitu barang yang menjadi sebab musabab nya perjajian *Ijārah*. Adanya kerusakan atau musnahnya barang yang menjadi sebab terjadinya perjanjian maka akad *Ijārah* tidak mungkin dapat dilaksanakan atau dipenuhi. Misalnya A mengupah B untuk mengecat ulang sebuah meja, namun meja yang akan dicat ulang ternyata mengalami kerusakan serius akibat dimakan rayap.
- 4) Manfaat telah terpenuhi. Maksudnya adalah tujuan dari perjajian *Ijārah* tersebut telah tercapai atau jangka waktu perjanjian *Ijārah* sudah berakhir sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Berakhirnya jangka waktu perjanjian *Ijārah* berarti secara otomatis akadnya berakhir tanpa harus mengadakan suatu perbuatan hukum tertentu untuk memutus hubungan perjanjian.
- 5) Munculnya uzur. Penganut mazhab Hanafi menambahkan adanya uzur yaitu suatu halangan yang menyebabkan perjanjian tidak dapat berjalan sebagaimana mastinya, putus atau berakhir, meskipun uzur tersebut muncul dari salah satu pihak saja. Misalnya, seseorang menyewa sebuah mobil bak terbuka untuk mengangkut padi hasil panen, kemudian padi yang akan diangkut hilang karena dicuri. Hal ini

secara tegas dalam perjanjian mengenai batas waktu, cara dan bentuk pekerjaannya, dan harus dilaksanakan sesuai yang telah ditentukan.

- c. Dalam akad *ju'alah* tidak dibenarkan untuk memberikan upah sebelum pekerjaan diwujudkan atau diselesaikan. Dalam akad *Ijarah*, diperbolehkan memberikan upah terlebih dahulu, baik secara keseluruhan ataupun hanya sebagian disesuaikan dengan kesepakatan bersama.
- d. Dalam akad *ju'alah*, tindakan hukum yang dilakukan bersifat sukarela, sehingga apa yang telah dijanjikan dapat dibatalkan selama pekerjaan belum dimulai tanpa menimbulkan akibat hukum. Apalagi tawaran akan pekerjaan dilakukan secara umum misalnya mengiklankan di media sosial. Namun, dalam akad *Ijarah* terjadi transaksi yang mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian kerja. Jika perjanjian tersebut dibatalkan, maka akan timbul akibat hukum bagi para pihak yang bersangkutan. Biasanya ada sanksi yang disebutkan juga dalam perjanjian di awal akad.
- e. Mazhab Maliki menetapkan kaidah dari segi ruang lingkup kedua akad tersebut, yakni semua yang diperbolehkan menjadi objek dalam transaksi *ju'alah*, maka diperbolehkan menjadi objek akad *Ijarah*. Tetapi, tidak semua yang dapat menjadi objek akad *Ijarah* di benarkan menjadi objek akad *ju'alah*. Dengan demikian maka ruang lingkup *Ijarah* lebih luas daripada *ju'alah*. Misalnya, pekerjaan menggali sumur sampai menemukan air. Dalam jualah, orang yang melakukan pekerjaan tersebut akan mendapatkan upah setelah pekerjaan tersebut

1. Bermuamalah adalah proses interaksi antar sesama manusia (hablun minannaas) yang meliputi pembuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi) serta penggunaan informasi dan komunikasi.
2. Media Sosial adalah media elektronik untuk berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi dalam bentuk blog jejaring sosial, forum, dunia virtual maupun bentuk lain.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
4. *Ghibah* adalah penyampaian informasi faktual tentang seseorang atau kelompok yang tidak disukainya, dapat berupa aib, kekurangan maupun rahasia.
5. Fitnah (*buhtan*) adalah kebohongan yang disebarakan untuk menjelekkkan nama baik maupun kehormatan seseorang.
6. *Namimah* adalah mengadu domba dengan menceritakan perbuatan seseorang yang berusaha menjelekkkan yang lainnya dan berakhir saling membenci satu sama lain.
7. Ranah publik adalah wilayah yang diketahui sebagai wilayah terbuka yang dapat diakses semua orang, termasuk media sosial twitter,

- c. Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
 - d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.
 - e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.
4. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.
 5. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, bullying, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.
 6. Mencari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i.
 7. Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.
 8. Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut disebar ke publik, seperti pose mempertontonkan aurat, hukumnya haram.

konteks yang berbeda yang memiliki kemungkinan pengertian yang berbeda.

- f. Memiliki hak, orang tersebut memiliki hak untuk penyebaran, tidak melanggar hak seperti hak kekayaan intelektual dan tidak melanggar hak privasi.
2. Cara memastikan kebenaran dan kemanfaatan informasi seperti yang telah disebutkan di atas adalah dengan:
 - a. Bertanya kepada sumber informasi jika diketahui dan permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi
 - b. Sebuah konten/ informasi harus dapat mendorong kepada kebaikan dan ketakwaan, mempererat persaudaraan dan cinta kasih, menambah ilmu pengetahuan, mendorong melakukan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi laranganNya, serta tidak melahirkan kebencian dan permusuhan
 3. Tidak boleh menyebarkan informasi yang berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain yang sejenis kepada khalayak.
 4. Tidak boleh menyebarkan informasi untuk menutupi kesalahan, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dengan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak.

5. Tidak boleh menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut tidak patut disebar ke ranah publik, seperti ciuman suami istri dan pose foto tanpa menutup aurat.
6. Setiap orang yang memperoleh informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain tidak boleh menyebarkannya kepada khalayak, meski dengan alasan tabayyun.
7. Setiap orang yang mengetahui adanya penyebaran informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain harus melakukan pencegahan.
8. Pencegahan dalam angka 7 dengan cara mengingatkan penyebar secara tertutup, menghapus informasi, serta mengingkari tindakan yang tidak benar tersebut.
9. Orang yang bersalah telah menyebarkan informasi hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis kepada khalayak, baik sengaja atau tidak tahu, harus bertaubat dengan meminta maaf kepada Allah (istighfar) serta; (i) meminta maaf kepada pihak yang dirugikan (ii) menyesali perbuatannya; (iii) dan komitmen tidak akan mengulangi.

6. Produk toner atau penyegar wajah, Karina menggunakan bahan dari produk Viva Toner varian lemon, spirulina dan mentimun seharga Rp. 7.000 per biji. produk toner tersebut didapatkan toko sekitar Desa Kandangan dan Pasar Besar Malang
7. Untuk bahan produk cleanser atau pembersih wajah ia juga menggunakan produk dari cleanser Viva Milk dan Viva Milk Spirulina yang dibeli dengan harga Rp. 7.000 per biji yang didapatkan dari toko sekitar Desa Kandangan dan Pasar Besar Malang
8. Bahan produk masker berasal dari produk masker bengkoang Mustika Ratu yang ia dapatkan seharga Rp. 30.000 per biji nya, yang dibeli oleh Karina dari Pasar Besar Malang. Sedangkan untuk bahan produk glowing mask dibeli secara online oleh Karina dalam bentuk Kiloan.
9. Produk bedak tabur bahannya berasal dari merek Marcks Beauty Powder yang ia beli seharga Rp. 15.000 per biji dari sebuah toko di daerah Malang.
10. Lulur badan menggunakan lulur merek Purbasari seharga Rp. 35.000 per botol yang dibeli dari toko kosmetik di sekitar desa Kandangan
11. Produk pelembab tangan dan kaki menggunakan merek M2J seharga Rp. 30.000 dan dibeli dari Swalayan Kediri
12. Sedangkan untuk alat kesehatan yaitu satu set alat infus dan obat whitening dibeli secara online seharga Rp. 350.000 per set dari Pekanbaru. Karina juga membuat label atau stiker untuk merek yang ditempel pada kemasan baru skincare miliknya yaitu DSC (Derma Skincare) Beauty

Karena kualitas vokal dan ciri khas gayanya ia bisa tampil layar kaca bahkan sampai ke Hongkong dan Tiongkok. Via Vallen juga memiliki *fans club* yang diberi nama vyanisty dan diresmikan tanggal 24 September 2014.

Namanya semakin terkenal berkat lagu “Sayang” pada tahun 2017 dengan genre lagu pop koplo dan ditonton lebih dari 100 juta kali di Youtube. Via menjadi nominasi dalam beberapa kategori ajang penghargaan musik dan juga berhasil memenangkan beberapa penghargaan ajang musik Indonesia. Selain itu, ia juga menyanyikan salah satu lagu resmi untuk Asian Games 2018 berjudul meraih bintang. Saat ini Via mendapat julukan “Ratu pop koplo”.⁷⁰ Ia juga aktif di media sosial Instagram, bahkan sudah memiliki 25,6 juta pengikut. Ia pernah melakukan kerjasama *endorse* dengan DSC Beauty dan memposting di akun instagram pribadinya yaitu @viavallen.

Dalam kerjasama ini ia menerima imbalan sebesar Rp. 7.000.000 untuk sekali pasang iklan dan produk kosmetik dikirimkan ke rumahnya. Via melakukan satu kali pemotretan dan video bersama 5 macam produk DSC Beauty dengan pose yang disesuaikan dengan gayanya sendiri, asalkan merk DSC Beauty nya terlihat. Postingan *endorse* di akun pribadi milik Via biasanya berdurasi satu bulan. Namun, ketika dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Via mengaku bahwa ia tidak mengetahui

⁷⁰ Ratih Fardiyah, “Biodata Via Vallen Terbaru, Berawal Penyanyi Kampung Kini Menjadi Ratu Dangdut Indonesia”, <https://suryamalang.tribunnews.com/amp/2020/03/30/biodata-via-vallen-terbaru-berawal-penyanyi-kampung-kini-menjadi-ratu-dangdut-indonesia>, diakses 19 November 2020.

Karir Nella di dunia musik dangdut semakin berkembang dan mulai manggung dengan orkes-okes ternama Jawa Timur. Akhirnya, ia menjadi artis lokal pesisir Jawa Timur, dan kemudian bergabung dengan perusahaan rekaman nasional. Single pertamanya adalah konco mesra, kemudian jaran goyang, bojo galak, dan masih banyak lagi.⁷⁸ Lagu-lagunya disukai dan menyita banyak perhatian masyarakat. Video musiknya di youtube bahkan ada yang mencapai 250juta views. Penyanyi dangdut ini juga memiliki komunitas fans yang dinamakan “Nella Lovers”.

Nella juga aktif di sosial media instagram dengan akun @nellakharisma dengan 6juta Followers. Di media sosial instagramnya ia juga melakukan beberapa *endorse*. DSC Beauty pernah melakukan kerjasama *endorsement* dengan Nella Kharisma dan ia menerima imbalan sebesar Rp. 5.000.000 untuk sekali *endorse* beserta produk kosmetik yang dikirimkan ke rumahnya. Pengiriman dilakukan melalui jasa kurir. Setelah barang diterima, Nella melakukan pemotretan dan mengambil video di salah satu rumah makan di Pare, Kediri dengan gaya nya sendiri dan memperlihatkan produk dan merek DCS Beauty dengan jelas.

Nella juga melakukan paid promote produk ini dengan rincian imbalan Rp. 1.500.000, Rp. 2.000.000, dan Rp. 3.000.000 dengan masa berlaku selama 2 minggu. Saat dimintai keterangan sebagai saksi di

⁷⁸ Alif Nur, “Biodata Nella Kharisma, Istri Dory Harsa Biduan asal Kediri, Keluarga Bukan Orang Sembarangan”, <https://www.google.com/amp/s/surabaya.tribunnews.com/amp/2020/09/10/biodata-nella-kharisma-istri-dory-harsa-biduan-asal-kediri-keluarga-bukan-orang-sembarangan>, diakses pada 19 November 2020.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA MUI NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP KERJASAMA *ENDORSEMENT* PRODUK SKINCARE DI DERMA SKINCARE BEAUTY

A. Analisis Praktik *Endorsement* Produk Skincare Di Derma Skincare Beauty

Melakukan promosi merupakan hal yang dibutuhkan pelaku usaha demi keberlangsungan usahanya. Berbagai strategi kreatif dan pemanfaatan teknologi dilakukan untuk mencapai promosi yang efektif. Kerjasama *endorsement* dengan selebriti menjadi salah satu cara yang saat ini banyak digunakan oleh pelaku usaha untuk membentuk *brand image* (citra merek) dan memperluas *market share* (pangsa pasar) produk yang mereka jual. Citra merek yang bagus akan lebih meyakinkan konsumen untuk melakukan *purchase* (pembelian), dan jangkauan pangsa pasar yang lebih luas diharapkan akan meningkatkan angka penjualan. Selebriti yang mendukung sebuah merek berarti mewakili merek tersebut dan disebut dengan *endorser*.

Sebuah merek produk kecantikan yaitu Derma Skincare Beauty (DSC Beauty) juga melakukan *endorsement* dengan 6 selebriti untuk mengenalkan produknya pada masyarakat luas dan meningkatkan penjualan. 6 selebriti tersebut adalah artis dan selebgram (selebriti instagram) yaitu Via Vallen, Olla Ramlan, Nia Ramadhani, Mimi Peri, Dkadoor, dan Nella Kharisma. *Endorsement* antara DSC Beauty dengan para selebriti memanfaatkan media

sosial instagram untuk mendukung promosi produknya.

Dalam kerjasama ini, kesepakatan dilakukan tanpa adanya surat kontrak maupun surat perjanjian apapun. Setelah dibuat kesepakatan, pembayaran imbalan dilakukan di awal, sebelum para *endorser* menjalankan tugasnya. Pembayarannya dilakukan dengan cara transfer melalui rekening manajemen selebriti atau ke rekening selebriti secara langsung. Setiap artis dan selebgram mematok harga yang berbeda untuk sekali *endorse*.

Beberapa jenis produk DSC Beauty dikirimkan kepada masing-masing *endorser* melalui jasa pengiriman JNT. Setelah produk diterima, semua *endorser* harus berfoto dan membuat video berdurasi 1 menit bersama dengan produk DSC Beauty sesuai dengan gaya dan di tempat masing-masing. Hasil foto dan video harus memperlihatkan merek DSC Beauty dengan jelas, setelah itu dikirimkan kepada Kalina selaku pemilik DSC Beauty dan menunggu caption yang diberikan oleh Kalina untuk kemudian di unggah pada akun instagram masing-masing *endorser* selama beberapa waktu tertentu dan akun instagram @Orkkayskin.id.

Setelah produk beredar luas ke beberapa kota besar Indonesia diantaranya Surabaya, Jakarta, Bandung, Medan, Yogyakarta, dan Makassar serta memiliki sekitar 60.000 konsumen, DSC Beauty kemudian diketahui sebagai produk ilegal yang tidak memiliki izin BPOM, dan melanggar undang-undang kesehatan karena mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Produk DSC Beauty berasal dari produk kosmetik yang sudah memiliki merek sendiri dan kemudian dikemas ulang dengan merek DSC Beauty. Di antara produk yang dikemas ulang, ternyata terdapat produk kosmetik yang sudah

ditarik oleh BPOM karena merupakan zat berbahaya, dan ada juga krim abal-abal yang dibeli secara kiloan.

Endorser yang dihadirkan sebagai saksi di persidangan mengaku bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa produk kosmetik yang mereka *endorse* merupakan produk ilegal. Seorang *endorser* harus menyampaikan informasi faktual mengenai produk yang ia *endorse*, karena tugasnya adalah mengenalkan produk pada khalayak umum. Ketidaktahuan seorang *endorser* terhadap spesifikasi produk yang sedang ia *endorse* berarti ia tidak benar-benar memahami bagian dari pekerjaan yang harus ia laksanakan. Ketidakakuratan informasi yang disampaikan bisa membuat konsumen salah pilih dan mengalami kerugian.

B. Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Mui Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial Terhadap Kerjasama *Endorsement* Produk Skincare Di Derma Skincare Beauty

Dari praktik *endorsement* yang dilakukan DSC Beauty, terdapat unsur pekerjaan dan upah. Dalam hal ini, pekerjaan dan upah dapat menjadi unsur dari akad *Ijārah* dan akad *ju'ālah*. Namun, kedua akad ini memiliki beberapa perbedaan di dalamnya. Dalam *endorsement* antara DSC Beauty dengan selebriti, upah dibayarkan di awal sebelum melakukan pekerjaannya. Dalam akad *Ijārah*, upah boleh dibayarkan di awal maupun di akhir pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan dalam akad *ju'ālah*, hal ini tidak diperbolehkan karena pembayaran harus dilakukan setelah semua pekerjaan

selesai. Dalam *endorsement* ini juga terdapat jangka waktu, dalam akad *ju'alah* tidak terdapat jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Maka, *endorsement* antara DSC Beauty dengan selebriti penulis kategorikan sebagai akad *Ijarah* yaitu *Ijarah 'amal* atau *asykhas* (sewa jasa). *Endorsement* ini telah memenuhi rukun *Ijarah* yaitu *'aqidayn* (dua pihak yang berakad) DSC Beauty sebagai pengguna jasa (*musta'jir*), selebriti/ *endorser* sebagai penyedia jasa (*'ajir*), adanya upah (*ujrah*) atas jasa *endorsement* dan manfaat/ jasa yaitu mendukung dan mempromosikan produk DSC Beauty, dan sighat (ijab qabul).

Dalam suatu akad tidak hanya rukun yang perlu diperhatikan, namun juga harus memenuhi beberapa syarat agar kerjasama ini sah secara syariat. Berikut ini penulis akan menganalisis satu persatu rukun yang telah disebutkan diatas sesuai dengan praktik *endorsement* antara pihak DSC Beauty dengan selebriti, untuk mengetahui apakah syarat sah masing-masing rukun sudah terpenuhi atau belum.

1. Subjek akad *Ijarah* yaitu dua pihak yang berakad (*'aqidayn*).

Dalam praktik *endorsement* yang dilakukan antara pihak DSC Beauty (Kalina) dengan selebriti, pihak yang disebut dengan *musta'jir* adalah pihak DSC Beauty sebagai pengguna jasa, dan pihak selebriti merupakan *'ajir* sebagai pemberi jasa atau pekerja. Kedua belah pihak yang melakukan kerjasama berada dalam keadaan berakal sehat, dewasa, dan cakap hukum (tidak sedang berada dalam pengampunan).

Dalam kaitannya sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak, DSC Beauty sebagai pengguna jasa mampu membayar imbalan atas jasa para selebriti, dan para selebriti sebagai penyedia jasa juga berhak dan mampu melakukan *endorsement* sesuai yang dibutuhkan oleh pengguna jasa. Yang tidak kalah pentingnya adalah kedua belah pihak melakukan kerjasama ini dengan rela dan tanpa adanya paksaan. Maka, syarat subjek '*aqidayn*' telah terpenuhi.

2. Pekerjaan atau '*amal*' yang dilakukan oleh penyedia jasa ('*ajir*')

Pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa harus pekerjaan yang diperbolehkan sesuai syari'at dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diketahui secara jelas jenis, spesifikasi, ukuran pekerjaan dan jangka waktunya *Endorsement* atau dukungan atas suatu merek dikategorikan sebagai pekerjaan yang diperbolehkan selama tidak melanggar syariat dan peraturan perundang-undangan. *Endorsement* yang dilakukan oleh selebriti memberikan pengaruh / manfaat yang besar dalam promosi hingga kepercayaan dan keputusan konsumen untuk melakukan pembelian.

Endorsement yang dilakukan oleh DSC Beauty memiliki tujuan agar produknya laris di pasaran. Maka dari itu, pihak DSC Beauty menggunakan selebriti terkenal untuk mendukung produknya. Menjadi *endorser* berarti menjadi wakil atau representasi dari produk yang sedang didukung. Masyarakat akan menganggap seorang *endorser*

menjadi berhasil atau menarik karena menggunakan produk yang didukung dan secara persuasif muncul persepsi bahwa mereka akan mendapatkan manfaat yang sama ketika menggunakan produk tersebut.

Namun, DSC Beauty akhirnya diketahui sebagai produk ilegal tanpa izin edar dan melanggar undang-undang kesehatan. Selebriti yang dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait *endorsement* mengaku tidak mengecek nomor BPOM pada produk kosmetik tersebut dan tidak mengetahui bahwa produk yang mereka dukung/*endorse* belum memiliki izin edar apapun. Produk kosmetik mengandung bahan kimia, sehingga membutuhkan uji laboratorium dan ijin dari pihak berwenang untuk menjaga keamanan konsumen dari resiko penggunaan bahan kimia berbahaya.

Endorsement sebagai salah satu strategi promosi dan berdampak pada penjualan, maka *endorser* harus memperhatikan kriteria produk yang akan didukung apakah sudah layak untuk diperjualbelikan. Salah satu kriteria barang yang dapat diperjual belikan menurut syariat adalah diketahui, yaitu adanya kejelasan mengenai keadaan barang meliputi hitungan, takaran, timbangan, kualitas, dan harga barang. Karena jika tidak diketahui, dikhawatirkan ada unsur penipuan. Barang yang akan dipromosikan dan diperjualbelikan seharusnya dipastikan aman dan bermanfaat bagi konsumen, bukan malah membahayakan atau merugikan.

Menyampaikan informasi faktual mengenai produk yang didukung merupakan bagian dari pekerjaan *endorser* dan pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama *endorsement*. Maka, seorang *endorser* harus mengetahui spesifikasi dan kualitas produk yang sedang ia dukung karena merupakan bagian dari pekerjaan yang seharusnya ia lakukan. Mengenai hal ini dapat dikatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh '*ajir*' belum memenuhi syarat karena spesifikasi pekerjaan untuk mempromosikan produk yang kualitas dan keamanannya belum diketahui secara jelas.

3. Upah/ *ujrah* atas pekerjaan yang dilakukan oleh '*ajir*'

Transaksi *Ijārah* didasarkan pada pengalihan manfaat atau jasa yang disertai dengan upah. Upah merupakan harga yang harus dibayarkan kepada '*ajir*' atas jasanya yang telah digunakan oleh *musta'jir*,. dan harga harus diketahui secara jelas.

Dalam praktiknya, pihak DSC Beauty telah melakukan pembayaran upah kepada masing-masing *endorser* dengan tepat. Para selebriti yang menjadi *endorser* produk kosmetik DSC Beauty telah menerima imbalan masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Imbalan yang diberikan berupa uang. Masing-masing *endorser* menerima imbalan yang berbeda, dengan nominal berkisar antara Rp. 5.000.000 hingga Rp. 18.000.000. Imbalan diberikan oleh pihak DSC Beauty dengan cara mentransfer uang secara tunai melalui akun rekening manager maupun rekening pribadi para *endorser*.

Beauty dengan selebriti belum memenuhi salah satu syarat sah yaitu dalam pekerjaan (*'amal*) yang dilakukan oleh *'ajir* karena kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kualitas dan keamanan produk yang sedang didukung, yang berarti spesifikasi pekerjaannya belum jelas.

Dalam melaksanakan kerjasama *endorsement* produk kosmetik DSC Beauty, *'ajir* menggunakan media sosial instagram. Dengan tujuan untuk mengarahkan masyarakat agar menggunakan media sosial secara bijak, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa No. 24 tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Dalam poin kedua fatwa ini memuat Ketentuan hukum bermuamalah melalui media sosial yang diatur sebagaimana berikut:

1. Bermuamalah dalam kehidupan riil atau media sosial, setiap muslim wajib berdasarkan keimanan dan ketakwaan, kebajikan, persaudaraan, saling mengingatkan kebenaran, mengajak kebaikan dan mencegah kemunkaran.
2. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal berikut ini:
 - a. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.
 - b. Mempererat persaudaraan, baik dalam keIslaman, kebangsaan, maupun kemanusiaan.
 - c. Memperkokoh kerukunan, baik dengan sesama umat seagama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.
3. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:
 - a. Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan.

- b. Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar apapun
 - c. Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
 - d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.
 - e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.
4. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.
 5. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, bullying, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.
 6. Mencari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i.
 7. Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.
 8. Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut disebar ke publik, seperti pose mempertontonkan aurat, hukumnya haram.

9. Aktifitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Termasuk orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya

Perlu diperhatikan pada pasal 7 Ketentuan Hukum diatas menyebutkan bahwa “memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram”. Kata “seolah-olah” dalam pasal tersebut mengindikasikan atas adanya daya upaya untuk mengakali hal-hal yang tidak benar atau tidak secara nyata terjadi, menjadi hal yang terlihat benar.

DSC Beauty menggunakan jasa selebriti terkenal yang memiliki banyak pengikut di akun media sosial instagramnya untuk melakukan *endorsement* agar calon konsumen semakin percaya pada khasiat produk kosmetik DSC Beauty yang benar-benar ampuh dalam merawat kecantikan, namun pada saat dipromosikan bahkan setelah diperjual belikan, kandungan dan jaminan keamanan bahan kimia yang ada didalamnya belum diketahui dan teruji secara pasti karena tidak memiliki izin edar.

Hal ini berarti DSC Beauty telah membangun opini yang tidak benar dikalangan calon konsumen maupun konsumennya sendiri. Setelah ada

2. Setelah praktik *endorsement* antara DSC Beauty dengan para selebriti dianalisis sesuai hukum islam dan fatwa MUI No. 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, praktik kerjasama yang termasuk dalam akad *Ijārah* yakni *Ijārah al-‘amal* atau *asy-khas* tersebut masih belum memenuhi syarat yang berkaitan dengan spesifikasi pekerjaan/ *‘amal* yang harus dilakukan oleh *‘ajir*. *Endorser* yang berperan dalam pemasaran produk tidak mengetahui kualitas produk yang sedang ia dukung, padahal *endorser* seharusnya faham mengenai kelayakan produk untuk dapat diperjual belikan sebelum mengenkannya pada masyarakat luas. Jika dilihat dari fatwa MUI No. 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, kerjasama *endorsement* ini telah membentuk opini yang tidak benar terkait dengan kualitas dan keamanan DSC Beauty ketika dipasarkan dan diperjual belikan. Yang kemudian setelah dicek oleh pihak berwenang ternyata ada jenis produk yang mengandung bahan kimia berbahaya.

- Marindal I Kabupaten Deli Serdang)". Skripsi--UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2019.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Go Dok. *Beauty Clopedia 110 Rahasia Cantik Alami*. Jakarta: Gramedia, 2019.
- Hardani; et al.. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Hartati, Ambaryati. "Endorsement Sebagai Starategi Pemasaran Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Hayyu Olshop Metro)". Skripsi--IAIN Metro, Lampung, 2019.
- Hermawan, Iwan. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019.
- Hermawan. *Pengantar Hukum Bisnis*. Surabaya:CV REVKA PRIMA MEDIA, 2019.
- Ismayani, Ade. *Metodologi Penelitian*. Aceh: Syiah Kuala Universuty Press, 2019.
- Kaser, Ken. *Advertising And Sales Promotion*. Mason, USA: South Western Cengage Learning, 2013.
- Khusnul, "Biodata, Profil dan Fakta Olla Ramlan", dalam <https://www.dailysia.com/biodata-profil-dan-fakta-olla-ramlan/>, (19 November 2020).
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Maharani, Esthi. "Pengrajin Kosmetik Ilegal Yang Endorse Artis Ditangkap", dalam <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pj7tkr335>, (20 September 2020).
- Masfufah, Amalina. "Kajian Hukum Jasa Endorse dalam Media Sosial (Instagram) : Studi pada Akun Lambe Turah". *Journal of Islamic Bussines Law*, volume 3 Issue 1, 2019.
- Muliyawan, Dewi dan Neti Suriana. *A-Z Tentang Kosmetik*. Jakarta: Gramedia, 2013.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Noorputeri, Zahrina Yustisia. "Soal Kosmetik Bermerkuri Yang Di-endorse Artis, Apa Bahayanya?", dalam <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparansains/soal-kosmetik-bermerkuri-yang-diendorse-artis-apa-bahayanya-154458329570065516>, (8 November 2020).

- Nur, Alif. “Biodata Nella Kharisma, Istri Dory Harsa Biduan asal Kediri, Keluarga Bukan Orang Sembarangan”, dalam <https://www.google.com/amp/s/surabaya.tribunnews.com/amp/2020/09/10/biodata-nella-kharisma-istri-dory-harsa-biduan-asal-kediri-keluarga-bukan-orang-sembarangan>, (19 November 2020).
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445/MENKES/PER/V/1998 tentang bahan, zat warna, substratum, zat pengawet dan tabir surya pada kosmetika.
- Public warning* BPOM No. KH.00.01.432.6081 tanggal 1 Agustus 2007 tentang kosmetik mengandung bahan berbahaya dan zat warna yang dilarang.
- Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2019/PN Sby.
- Rinanda, Hilda Meilisa. “Polisi Amankan Kosmetik Ilegal Yang Endorse 6 Artis Indonesia”, dalam <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/-d-4330233/polisi-amankan-kosmetik-ilegal-yang-endorse-6-artis-indonesia>, (7 Agustus 2020).
- Rosadi, Aisyah Puteri ;et al. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Etika Endorser dalam Praktik *Endorsement* di Media Sosial Instagram (Studi Kasus pada Nurul Fatimah)” : *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, No.2, volume 5, tahun 2019.
- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan eksekusi)*. Depok: Kencana, 2017.
- Safitri, Rahmi. “Sering Halu Di Sosmed, Keseharian Mimi Peri Ternyata Beda Jauh”, dalam <https://m.merdeka.com/gaya/sering-halu-di-sosmed-keseharian-mimi-peri-ternyata-beda-jauh.html>, (19 November 2020).
- Saputri, Mertarega., “Biodata Nia Ramadhani, Perjalanan Karier hingga sinetron yang dibintangi Nia Ramadhani”, dalam <https://lampung.tribunnews.com/amp/2020/09/15/biodata-nia-ramadhani-perjalanan-karier-hingga-sinetron-yang-dibintangi-nia-ramadhani>, (19 November 2020).
- Sari, Ika Artika. “Derma Skin Care Patok Harga Ratusan Ribu Per Paket”, dalam <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/derma-skin-care-patok-harga-ratusan-ribu-per-paket-dbdZ>, (20 September 2020).
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia7: Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Swastyastu, Galuh Palupi. “Unggahan Foto Nikahnya Viral, Inilah Sosok Wanita Cantik Istri Selebgram Centil Dkadoor”, dalam <https://www.google.com/amp/s/solo.tribunnews.com/amp/2018/01/28/unggah-foto-nikahnya-viral-inilah-sosok-wanita-cantik-istri-selebgram-centil-dkadoor>, (19 November 2020).
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Redaksi Jagapati.com, “Pentingkah Produk Terdaftar di BPOM?”, dalam <https://www.jagapati.com/artikel/Pentingkah-Produk-Terdaftar-di-BPOM>, (20 Juli 2020).
- Tim redaksi Teropong.com, “Abaikan Undang Undang Kesehatan, Karina Bos Kosmetik Divonis Ringan”, dalam <https://sknteropong.com/abaikan-undang-undang-kesehatan-Karina-bos-kosmetik-divonis-ringan/>, (20 September 2020).
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Strategi Pemasaran Dengan Menggunakan Jasa *Endorsement* Pada Klinik Kecantikan (Studi Kasus Di Sumia Clinic Bandar Lampung)”. Skripsi-- UIN Raden Intan, Lampung, 2018.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.